**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



# I. PE N D A H U L U A N

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

## MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

## LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

## SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | PENDAHULUAN1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
 |
| BAB II | IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program2.3 Posisi Keuangan2.4 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja |
| BAB III | PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH3.1 Penjelasan Pos-posLaporan Realisasi Anggaran1. Belanja Daerah

3.2Penjelasan Pos-pos Neraca1. Aset
2. Kewajiban
3. Ekuitas

3.3Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional1. Beban
2. Kegiatan Non Operasional
3. Pos-pos Luar Biasa
4. Surplus (Defisit) LO

3.4Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas |
| BAB IV | INFORMASI NON KEUANGAN |
| BAB V | PENUTUP |

# II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

## 2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuanganBagian Humas Protokol Setda Kab. Lumajang Tahun2019sebagai berikut.

### BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun angaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumajangadalahbelanja langsung yang meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel1Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Belanja** | **Anggaran** | **Realisasi** | **~~%~~** | **Sisa Anggaran** |
| 1 | Belanja Operasi | 3.035.217.336 | 2.837.214.312 | 93,48 | 198.003.024 |
|  | Jumlah Belanja | 3.035.217.336 | 2.837.214.312 | 93,48 | 198.003.024 |

###

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel2Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2014 - 2019**

| **Belanja** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belanja Pegawai | - | - |  100.559.200 | 76.446.000 | 44.437.000 |
| Belanja Barang  | - | - | 1.458.050.107 | 1.129.438.731 | 2.792.777.312 |
| **Jumlah** |  |  | **1.558.609.307** | **1.205.884.731** | **2.837.214.312** |
| penaikan% |  |  |  | 77,36 % | 42,50 |

 Terlihat pada tabel bahwasannya belanja pada bagian humas dan protokol setda kabupaten lumajang mengalami penaikan 42,50%di tahun 2019 dari tahun 2018

## 2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 1** | **: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |
| *Kegiatan 1* | *: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran* |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Pegawai
 | 36.582.000 | 35.802.000 |  |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 1.267.950.736 | 1.192.445.723 |  |
| *Jumlah Kegiatan 1* | *1.304.532.736* | *1.228.247.723* |  |
| Program 1 | **1.304532.736** | **1.228.247.723** |  |
| **Program 2** | **: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |
| *Kegiatan 1* | *: Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur* |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Pegawai
 | 3.120.000 | 2.460.000 |  |
| - Belanja Barang & Jasa | 158.490.000 | 141.156.164 |  |
| *Jumlah Kegiatan 1* | *161.610.000* | *143.616.164* |  |
| **Jumlah Program 2** | **161.610.000** | **143.616.164** |  |
| **Program 3** | **: Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** |
| *Kegiatan 1* | *Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan* |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| Belanja Pegawai | 6.750.000 | 6.175.000 |  |
| Belanja Barang & Jasa | 1.215.825.000 | 1.119.198.475 |  |
| *Jumlah Kegiatan 1* | *1.222.575.000* | *1.125.373.475* |  |
| Kegiatan 2 | *Pendokumentasian Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah* |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| Belanja Barang & Jasa | 39.525.000 | 39.525.000 |  |
| *Jumlah Kegiatan 2* | *39.525.000* | *39.525.000* |  |
| **Jumlah Program 3** | **1.262.100.000** | **1.164.989.475** |  |
| **Program 4** | **: Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah** |
| *Kegiatan 1* | *: Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah* |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| Belanja Barang & Jasa | 306.974.600 | 300.451.950 |  |
| *Jumlah Kegiatan 1* | *306.974.600* | *300.451.950* |  |
| **Jumlah Program 4** | **306.974.600** | **300.451.950** |  |
| **Jumlah Belanja**  | **3.035217.336** | **2.837.214.312** |  |

## 2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumjanag selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel3Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014 s.d. 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posisi Keuangan** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1. Aset
 |  |  | 1.861.388.204,16 | 616.178.021,12 | 1.634.072.969 |
| 1. Kewajiban
 |  |  | 1.285.527 | 750.000 | 45.838 |
| 1. **Ekuitas**
 |  |  | **(1.861.388.731,16)** | **(764.169.893,88)** | **(615.428.021,12)** |
| **Jumlah Kewajiban & Ekuitas** |  |  | **(1.861.388.204,16)** | **616.178.021,12** | **1.018.690.786** |

## 2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

## KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

### 2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

### 2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

### 2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

# III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

## 3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRABagian Humas dan Protoko Setda Kabupaten Lumajangmencakup belanja saja,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2019****(Rp)** |  | **Realisasi TA 2019****(Rp)** |  | **Realisasi TA 2018****(Rp)** |
| Belanja Operasi | **3.035.217.336** |  | **2.837.214.312** |  | **1.205.884.731,00** |

Belanja operasi pada Bagian Humas dan Protoko Setda Kabupaten Lumajangterdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 4Realisasi Belanja Operasi tahun 2019 dan 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Belanja Operasi** | **Anggaran 2019** | **Realisasi 2019** | **%** | **Realisasi 2018** |
| 1 | Belanja Pegawai | 46.452.000,00 | 44.437.000,00 | 95.66 | 76.446.000,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.988.765.336,00 | 2.792.777.312,00 | 93.44 | 1.129.438.731,00 |
|  | **Jumlah** | **3.035.217.336,00** | **2.837.214.312,00** | **93.48** | **1.205.884.731,00** |

Belanja pegawai Bagian Humas dan Protoko Setda Kabupaten Lumajang meliputibelanja langsung. belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 5 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2019

| **No** | **Rincian Belanja Pegawai** | **Anggaran 2019** | **Realisasi 2019** | **%** | **Realisasi 2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BELANJA LANGSUNG** |  |  |  |  |
| 1 | Honorarium PNS | 26.132.000,00 | 24.224.000,00 | 92.62 | 49.500.000,00 |
| 2 | Uang lembur PNS | 20.320.000,00 | 20.213.000,00 | 99,47 | 26.946.000,00 |
|  | Jumah Belanja Pegawai | 46.452.000,00 | 44.437.000,00 | 95.66 | 76.446.000,00 |

Tabel6 Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **Anggaran 2019** | **Realisasi 2019** | **Realisasi 2018** |
| 1 | Belanja Persediaan | 479.006.336,00 | 354.923.026,00 | 277.677.200,00 |
| 2 | Belanja Jasa | 1.756.378.600,00 | 1.748.017.787,00 | 563.782.172,00 |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | 122.490.000,00 | 108.156.164,00 | 107.256.539,00 |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas | 621.890.400,00 | 581.680.335,00 | 180.722.820,00 |
|  | **Jumlah** | **2.988.765.336,00** | **2.792.777.312,00** | **1.129.438.731,00** |

###### **Belanja Persediaan**

Belanja persediaan pada Bagian Humas dan protokol Setda Kabupaten Lumajang yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp 354.923.026,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 7 Realisasi Belanja Persediaan tahun 2019

| **No.** | **Belanja Persediaan** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja alat tulis kantor | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 |
| 2 | Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya | 6.450.000,00 | 5.955.000,00 |
|  3 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 3.012.736,00 | 3.012.601,00 |
| 5 | Belanja cetak | 90.344.000,00 | 90.322.000,00 |
| 6 | Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan | 26.174.600,00 | 24.526.950,00 |
| 7 | Belanja makanan dan minuman rapat | 64.800.000,00 | 64.575.000,00 |
| 8 | Belanja makanan dan minuman tamu | 201.825.000,00 | 105.198.475,00 |
| 9 | Belanja pakaian batik tradisional | 24.500.000,00 | 24.150.000,00 |
| 10 | Belanja pakaian Dinas Lapangan | 52.500.000,00 | 27.783.000,00 |
|  | **Jumlah** | **479.006.336,00** | **354.923.026,00** |

###### **Belanja Jasa**

Belanja jasa pada Bagian Humas dan protokol Setda Kabupaten Lumajang meliputi belanja jasa kantor ; ongkos/upah kerja dan belanja premi asuransi

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp 1.748.017.787,00dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8: Realisasi Belanja Jasa Tahun 2019

| **No** | **Belanja jasa** | **Anggaran 2019** | **Realisasi 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja telepon | 6.000.000,00 | 663.832,00 |
| 2 | Belanja kawat/faksimili/internet | 12.000.000,00 | 9.750.000,00 |
| 3 | Belanja dokumentasi | 21.125.000,00 | 21.125.000,00 |
| 4 | Belanja alat rumah tangga (Home Use) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 5 | Belanja penggantian transport | 1.230.000.000,00 | 1.225.350.000,00 |
| 6 | Belanja premi asuransi ketenagakerjaan | 2.613.600,00 | 2.588.955,00 |
| 7 | Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan | 441.600.000,00 | 436.900.000,00 |
| 8 | Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan | 43.040.000,00 | 42.640.000,00 |
|  | **Jumlah** | **1.756.378.600,00** | **1.748.017.787,00** |

###### **Belanja Pemeliharaan**

Belanja pemeliharaan pada Bagian Humas dan protokol Setda Kabupaten Lumajang meliputi belanja pemeliharaan aset tetap meliputi belanja perawatan kendaraan bermotor; belanja pemeliharaan alat kantor; belanja pemeliharaan alat rumah tangga; belanja pemeliharaan komputer.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 108.156.164,00terinci sebagai berikut.

Tabel 9: Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2019

| **No** | **Belanja Pemeliharaan** | **Anggaran 2019** | **Realisasi 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja bahan bakar minyak dan pelumas | 65.440.000,00 | 55.316.164,00 |
| 3 | Belanja pemeliharaan alat reproduksi (pengganda) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4 | Belanja pemeliharaan home use | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 |
| 5 | Belanja pemeliharaan personal komputer | 30.600.000,00 | 26.390.000,00 |
| 6 | Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 |
|  | **Jumlah** | **122.490.000,00** | **108.156.164,00** |

###### **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja perjalanan dinaspada Bagian Humas dan protokol Setda Kabupaten Lumajangmeliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah.Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 581.680.335,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 10: Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Belanja Perjalanan Dinas** | **Anggaran 20107**  | **Realisasi** |
| 1 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 301.250.000,00 | 270.170.000,00 |
| 2 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 320.640.400,00 | 311.510.335,00 |
|  | **Jumlah** | **621.890.400,00** | **581.680.335,00** |

##

## PENJELASAN POS-POS NERACA

### ASET LANCAR

Aset lancar Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari kas dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 11: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **31 Desember 2019** | **31 Desember 2018** |
| Kas di bendahara pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan | 115.452.902,00 | 79.739.591,00 |
| **Jumlah** | **115.452.902,00** | **79.739.591,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | **0,00** |  | **0,00** |

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 12Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Saldo 31 Desember 2017
 |  | 0 |
| 1. Peneriman :
 |  |  |
| * SP2D UP
 | 150.000.000 |  |
| * SP2D TU
 | 500.000.000 |  |
| * SP2D GU
 | 2.187.214.312 |  |
|  **Jumlah Penerimaan** | **2.837.214.312** |  |
| 1. Pengeluaran :
 |  |  |
| * SPJ UP/GU
 | 2.187.214.312 |  |
| * SPJ GU Nihil
 | 149.999.173 |  |
| * SPJ TU Nihil
 | 386.982.968 |  |
| * Setor kembali sisa TUP
 | 113.017.032 |  |
| * Setor kembali sisa UP/GU
 | 827 |  |
| * Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu
 | 0 |  |
|  **Jumlah pengeluaran** | **2.837.214.312** |  |
| 1. Saldo 31 Desember 2019
 |  | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **8)**Persediaan | **115.452.902,00** |  | **79.739.591,00** |

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018, merupakan hasil*stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

**Tabel13 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2019**

| **No** | **Uraian** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Persediaan per 31 Desember 2018 |  | 79.739.591,00 |
| 2 | Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal  |  | 0,00 |
| 3 | Saldo persediaan setelah koreksi  |  | 79.739.591,00 |
| **4** | **Ditambah :** |  |  |
| 5 | Belanja Persediaan LRA 2019 | 354.923.026,00 |  |
| 6 | Penerimaan droping persediaan dari bagian umum | 105.903.210,00 |  |
| 7 | Jumlah tambahan persediaan  | 460.826.236,00 |  |
| **8** | **Dikurangi :** |  |  |
| 9 | Pengeluaran persediaan | 0,00 |  |
| 10 | Jumlah tambahan persediaan bersih | 460.826.236,00 |  |
| 11 | Jumlah persediaan yang siap digunakan |  | 540.565.827,00 |
| 12 | Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional) |  | (431.234.383,00) |
| 13 | Persediaan tahun 2019 |  | 115.452.902,00 |

**Tabel14Daftar Persediaan Tahun 2019 dan 2018**

*dalam rupiah*

| **No** | **Persediaan** | **2019** | **2018** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persediaan Alat Tulis Kantor | 14.114.852,00 | 9.911.011,00 |
| 2 | Persediaan Barang cetakan | 100.953.550,00 | 69.802.780,00 |
| 3 | Persediaan Perangko | 126.000,00 | 0,00 |
| 4 | Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih | 258.500,00 | 25.800,00 |
|  | **Jumlah** | **115.452.902,00** | **79.739.591,00** |

### ASET TETAP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| Aset Tetap | **1.328.076.019,00** |  | **1.406.783.019,00** |

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.Aset tetap milik Bagian Humas dan Protokol SetdaKabupaten Lumajang meliputi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya.

Seluruh aset tetap milikBagian Humas dan Protokol Setdakabupaten Lumajang disusutkan, selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

* Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
* Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
* Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
* Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
* Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018sebagai berikut :

Tabel15 Daftar Mutasi Aset Tetapper 31 Desember 2019 dan 2018

| **No** | **Uraian** | **Saldo Awal** | **Koreksi** | **Mutasi** | **Saldo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Des 2018** | **Bertambah** | **Berkurang** | **31 Des 2019** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Peralatan dan Mesin | 1.406.783.019,00 |  | 193.615.000,00 | 272.322.000,00 | 1.328.076.019,00 |
| 2 | Aset Tetap Lainnya | 28.000.000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 28.000.000,00 |
|  | **Jumlah** | **1.434.783.019,00** |  | **272.322.000,00** | **193.615.000,00** | **1.356.076.019,00** |

Rincian koreksi aset tetap sebagai berikut :

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2019sebagai berikut.

1. Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp193.615.000,00meliputi:
2. Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp193.615.000,00
3. Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp272.322.000,00meliputi:
4. Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp272.322.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| Peralatan dan Mesin | **1.328.076.019,00** |  | **1.406.783.019,00** |

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 1.328.076.019,00dan RpRp1.406.783.019,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 16Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesinper 31 Desember 2019 dan 2018

| **No** | **Peralatan dan mesin** | **Saldo Awal** | **Koreksi** | **Mutasi** | **Saldo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Des 2017** | **Bertambah** | **Berkurang** | **31 Des 2019** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Alat-alat besar |  |  |  |  |  |
| 2 | Alat-alat Angkutan  | 565.404.727,00 |  | 176.490.000,00 | 272.322.000,00 | 560.572.727,00 |
| 3 | Alat-alat bengkel dan Alat Ukur |  |  |  |  |  |
| 4 | Alat-alat Pertanian |  |  |  |  |  |
| 5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 733.978.292,00 |  | 14.850.000,00 |  | 748.828.292,00 |
| 6 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | 16.400.000,00 |  | 2.275.000,00 |  | 18.675.000,00 |
| 7 | Alat-alat Kedokteran |  |  |  |  |  |
| 8 | Alat-alat Laboratorium |  |  |  |  |  |
| 9 | Alat-alat Persenjataan dan Keamanan |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **1.406.783.019,00** |  | **272.322.000,00** | **193.615.000,00** | **1.328.076.019,00** |

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer dan mesin fax yang merupakan droping dari Bagian Umum Setda Kabupaten Lumajang serta kendaraan bermotor roda 4 berupa mobil toyota avanza mutasi dari BPBD Kab. Lumajang. sedangkan pengurangan aset tetap berupa kendaraan bermotor roda 4 karena mutasi ke BPBD Kab. Lumajang berupa mobil Izuzu Panther.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| Aset Tetap Lainnya | **28.000.000,00** |  | **28.000.000,00** |

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2018dan 2019masing-masing sebesar Rp 28.000.000,00 dan Rp 28.000.000,00Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

**Tabel17Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2019**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis** | **31 Des2018** | **Koreksi** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **31 Des 2019** |
| 1 | Buku dan Pepustakaan |  |  |  |  |  |
| 2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 28.000.000,00 |  |  |  | 28.000.000,00 |
| 3 | Hewan Ternak dan Tanaman |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **28.000.000,00** |  |  |  | **28.000.000,00** |

Tidak terjadi perubahan saldoAset Tetap Lainnya selama tahun 2019disebabkan tidak ada penambahan ataupun pengurangann pada aset tetap lainnya.

### ASET LAINNYA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| Aset Lainnya | **286.376.950,00** |  | **277.996.950,00** |

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp286.376.950,00**sedangkan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar **Rp277.996.950,00**terinci sebagai berikut :

**Tabel 18Daftar Rincian Aset lainnyaper 31 Desember 2018**

*dalam rupiah*

| **No** | **Jenis** | **31 Desember 2018** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **31 Desember 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuntutan Ganti Rugi |  |  |  |  |
| 2 | Aset Tak Berwujud | 44.500.000,00 |  |  | 44.500.000,00 |
| 3 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud |  |  |  |  |
| 4 | Aset Lain lain | 241.876.950,00 |  | 8.380.000,00 | 233.496.950,00 |
|  | **Jumlah** | **286.376.950,00** |  |  | **277.996.950,00** |

 Aset lainnya pada Bagian Humas dan protokol setda Kabupaten Lumajang merupakan Aset Tak Berwujud berupa software aplikasi dan aset lain-lain yang merupakan aset tetap yang kondisinya rusak berat dan hilang

### KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2017 dan 2019 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp 1.285.527,00 dan Rp 750.000,00 diuraikan sebagai berikut.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| Kewajiban Jangka Pendek | **750.000,00** |  | **45.838,00** |

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi.Kewajiban jangka pendek pada Bagian humas dan protokol Setda Kabupaten Lumajang adalah utang belanja jasa.Saldo kewajibanjangka pendek per 31 Desember 2018 dan 2019masing-masing sebesar Rp750.000,00dan Rp. 45.838,00 Kewajiban jangka pendek tersebut adalah utang belanja jasa internet..

**Utang Belanja Jasa**

Saldo utang belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.838,00merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian telepon dan internet yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

**Tabel 19Rincian Utang Belanja Jasa Tahun2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Utang** | **31 Des 2018** | **Penambahan 2018** | **Pengurangan 2018** | **31 Des2019** |
| 1 | Jasa telepon | 00,0 | 45.838,00 | 0,00 | 45.838,00 |
| 2 | Internet | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | **Jumlah** | **750.000,00** | **45.838,00** | **0,00** | **45.838,00** |

### EKUITAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| Ekuitas | **615.428.021,12** |  | **1.634.027.131,00** |

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban Bagian Humas dan Protokol Setda.Saldo ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2019sebagai berikut.(jumlah aset = at+atb+atl+all)

**Tabel20 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2019**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Akun** | **31 Desember 2018** | **31 Desember 2019** |
| 1 | Jumlah Aset | 616.178.021,12 | 1.634.072.969,00 |
| 2 | Jumlah Kewajiban | 750.000,00 | 45.838,00 |
| 3 | Ekuitas (1(2) | 615.428.021,12 | 1.634.027.131,00 |

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

**Tabel21Daftar Rincian Ekuitas Bagian Humas dan Protokol SetdaKabupaten Lumajangper 31 Desember 2018 dan 2019**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2018** | **2019** |
|
| 1 | Ekuitas Awal | (1.861.388.731,16) | 615.428.021,12 |
| 2 | Surplus (Defisit) LO | (1.399.737.238,38) | (2.906.700.049,00) |
| 3 | Dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi / kesalahan mendasar | 2.496.956.075,66 |  |
| 4 | EKUITAS AKHIR | (764.169.893,88) | (2.291.272.027,88) |

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1. **PENDAPATAN LO**

Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang bukan merupakan instansi penghasil, sehingga tidak ada pendapatan yang diterima.

### b. BEBAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| Beban Pegawai-LO | **76.446.000,00** |  | **44.437.000,00** |

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2018 dan 2019, sebagai berikut.

**Tabel 22 Perhitungan Beban PegawaiTahun 2018 dan 2019**

*dalam rupiah*

| **Uraian** | **2018** | **2019** |
| --- | --- | --- |
| Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan | 46.125.000,00 | 20.144.000,00 |
| Honorarium penyimpan/ pengurus barang | 2.175.000,00 | 2.100.000,00 |
| Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan | 1.200.000 | 1.980.000,00 |
| Uang lembur PNS | 26.946.000 | 20.213.000,00 |
| **DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar** | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Belanja Pegawai Lo** | **76.446.000,00** | **44.437.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| Beban Barang dan Jasa-LO | **1.188.521.193** |  | **2.862.263.049,00** |

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Bagian Humas dan protokol Setda meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2018 dan 2019 sebagai berikut.

**Perhitungan Beban barang dan Jasa tahun 2019 :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BEBAN BARANG DAN JASA** |  |  |
| 1 | Persediaan Awal 1 Januari 2019 | 79.739.591,00 |  |
| 2 | Belanja Barang Dan Jasa Dari LRA | 2.792.777.312,00 |  |
| 3 | Penerimaan Barang Dari Bag. Umum | 105.903.210,00 | Droping persediaan dari umum |
| 4 | Utang belanja telepon dan internet  | 750.000,00  |  |
| 5 | Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat | **0,00** |  |
| 6 | Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap | **0,00** |  |
| 7 |  |  | **2.979.170.113**  |
|  | **Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia** |  | **0,00**  |
| 11 | Persediaan 31 Desember 2019 |  | 115.452.902,00 |
| 12 | Mutasi Keluar barang  |  | 0,00  |
| 13 | Utang Belanja Barang dan jasa yang menambah beban Tahun 2018Yang Dibayarkan Di 2019 |  | 750.000,00 |
| 14 | Koreksi Persediaan-Lebih Catat |  | 0,00  |
|  | **Jumlah Pengurangan Beban** | (-) | **2.862.263.049,00** |
|  | **Beban Barang/Jasa – Lo** |  | 2.862.263.049,00 |

**Tabel22Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2019**

*dalam rupiah*

| **No** | **Beban Barang dan Jasa** | **Tahun 2018** | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban Persediaan | 337.295.189,00 | 425.112.925,00 |
| 2 | Beban Jasa | 563.246.645,00 | 1.747.313.625,00 |
| 3 | Beban Pemeliharaan | 107.256.539,00 | 108.156.164,00 |
| 4 | Beban Perjalanan Dinas | 180.722.820,00 | 581.680.335,00 |
|   | **Jumlah** | **1.188.521.193,00** | **2.862.263.049,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| **Beban Persediaan** | **337.295.189,00** |  | **425.112.925,00** |

Beban persediaan mencerminkan barang-barangpersediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2018 dan 2019, terinci sebagai berikut.

**Perhitungan Beban persediaaan tahun 2019 :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BEBAN PERSEDIAAN** |  |  |
| 1 | Persediaan Awal 1 Januari 2019 | 79.739.591,00 |  |
| 2 | Belanja Barang Dan Jasa Dari LRA | 354.923.026,00 |  |
| 3 | Penerimaan Barang Dari Bag. umum | 105.903.210,00 |  |
| 4 | Utang belanja yang menambah beban | 0,00  |  |
| 5 | Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat | **0,00** |  |
| 6 | Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap | **0,00** |  |
| 7 | Dst………. |  | **540.565.827,00** |
|  | **Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia** |  |  |
| 11 | Persediaan 31 Desember 2019 |  | 115.452.902,00 |
| 12 | Mutasi Keluar barang  |  | 0,00  |
| 13 | Utang Belanja Barang yang menambah beban Tahun 2018Yang Dibayarkan Di 2019 |  | 0,00  |
| 14 | Koreksi Persediaan-Lebih Catat |  | 0,00  |
|  | **Jumlah Pengurangan Beban** | (-) | **425.112.925,00** |
|  | **Beban Barang/Jasa – Lo** |  | 425.112.925,00 |

**Tabel23Daftar Rincian Beban PersediaanTahun 2018 dan 2019**

*dalam rupiah*

| **No.** | **Beban Persediaan** | **Tahun 2018** | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban alat tulis kantor | 59.910.994,00 | 58.049.369,00 |
| 3 | Beban Cetak dan Penggandaan | 113.398.870,00 | 112.221.230,00 |
| 4 | Beban materei | 1.959.000,00 |  5.829.000 ,00 |
| 5 | Beban kebersihan dan bahan pembersih | 2.805.625,00 | 2.779.901,00 |
| 6 | Beban penggandaan/fotocopy | 20.520.700,00 | 24.526.950,00 |
| 7 | Beban makan mimun rapat | 21.225.000,00 |  64.575.000 ,00 |
| 8 | Beban makan minum tamu | 100.975.000,00 | 105.198.475,00 |
| 9 | Beban Dinas Lapangan | 9.000.000,00 | 27.783.000,00 |
| 10 | Beban pakaian Batik | 7.500.000,00 | 24.150.000,00 |
|   | **Jumlah Beban Persediaan** | **337.295.189,00** | **425.112.925,00** |

1. Beban ATK senilai Rp.58.049.369,00 diperoleh berdasarkan perhitungan saldo awal droping bag. Umum senilai Rp. 9.911.001,00ditambah (+) penerimaan dari bag. Umum senilai 52.853.210,00ditambah (+) belanja LRA senilai 9.400.000,00 dikurangi persediaan akhir tahun 2019 senilai Rp. 14.114.852,00
2. Beban cetak senilai Rp.112.211.230,00diperoleh berdasarkan perhitungan saldo awal droping bag. Umum senilai Rp. 69.802.780,00 ditambah (+) penerimaan dari bag. Umum senilai 35.050.000,00 ditambah (+) belanja LRA senilai Rp. 90.322.000,00 dikurangi persediaan akhir tahun 2019 senilai Rp. 100.953.550,00
3. Beban kebersihan senilai Rp.2.779.901,00diperoleh berdasarkan perhitungan saldo awal senilai Rp. 25.800,00 ditambah (+) belanja LRA senilai Rp. 3.012.601 dikurangi persediaan akhir tahun 2019 senilai Rp. 258.500,00
4. Beban materai senilai Rp.5.829.000,00diperoleh berdasarkan perhitungan saldo awal senilai Rp. 000 ditambah (+) belanja LRA senilai Rp. 5.955.000,00 dikurangi persediaan akhir tahun 2019 senilai Rp. 126.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| **Beban Jasa** | **563.246.654,00** |  | **1.747.313.625,00** |

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya.

**Tabel 25 Daftar Rincian Beban JasaTahun 2018 dan 2019**

*dalam rupiah*

| **No** | **Jenis Beban Jasa** | **Tahun 2018** | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban Telepon | 1.831.785,00 | 709.607,00 |
| 2 | Beban Internet | 9.883.000,00 | 9.000.000,00 |
| 3 | Beban penggantian Transport | 284.250.000,00 |  1.225.350.000,00 |
| 4 | Beban belanja Dokumentasi | 5.100.000,00 | 21.125.000,00 |
| 5 | Beban belanja Home use | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 6 | Beban Asuransi kesehatan | 958.860,00 | 0,00 |
| 7 | Beban asuransi ketenagakerjaan | 1173000,00 | 2.588.955,00 |
| 8 | Beban upah tenaga kerja bulanan | 238.200.000,00 | 436.900.000,00 |
| 9 | Beban upah tambahan tenaga kerja bulanan | 21.850.000,00 | 42.640.000,00 |
|  | **Jumlah beban jasa**  | **563.246.645,00** | **Rp1.747.313.625,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| **Beban Pemeliharaan** | **107.256.539,00** |  | **108.156.164,00** |

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2018 dan 2019masing-masing sebesar Rp107.256.539 dan Rp.108.156.164,00

Tabel 24Daftar Rincian Beban PemeliharaanTahun 2018 dan 2019

*dalam rupiah*

| **No** | **Beban Pemeliharaan** | **Tahun 2018** | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 82.966.539,00 | 55.316.164,00 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Komputer | 24.290.000,00 | 32.240.000,00 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 4 | Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga | 0,00 | 15.600.000,00 |
|  | **Jumlah** | **107.256.539,00** | **108.156.164,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| **Beban Perjalanan Dinas** | **180.722.820,00** |  | **581.680.335,00** |

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalann dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut.

**Tabel 27 Daftar Beban Perjalanan DinasTahun 2018 dan 2019**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Beban Perjalanan Dinas** | **2018** | **2019** |
| 2 | Beban perjalanan dinas dalam daerah | 28.375.000,00 | 270.170.000,00 |
| 3 | Beban perjalanan dinas luar daerah | 152.347.820,00 | 311.510.335,00 |
|  | **Jumlah Beban Perjalanan Dinas** | **180.722.820,00** | **581.680.335,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| Beban Penyusutan danAmortisasi | **134.770.045,38** |  | **105.254.969,37** |

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2018 dan 2019masing-masing sebesar Rp134.770.045,38dan Rp. 105.254.969,37sebagai berikut.

**Tabel 28 Daftar Beban Penyusutan dan AmortisasiTahun 2018 dan 2019**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Beban Penyusutan** | **Tahun 2018** | **Tahun 2019** |
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 134.770.045,38 | 105.254.969,37 |
| 2 | Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
|  | Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap | 134.770.045,38 | 105.254.969,37 |
| 5 | Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
|   | **Jumlah** | **134.770.045,38** | **105.254.969,37** |

## PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| Ekuitas Awal | **615.428.021,12** |  | **615.428.021,12** |

Saldo ekuitas awal tahun 2018 sebesar Rp615.428.021,12Sedangkan ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp615.428.021,12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| Surplus (Defisit) LO | **(0)** |  | **(2.906.700.049)** |

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, sebagai berikut.

**Tabel 29 Surplus/Defisit LO**

**Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2019**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2018** | **2019** |
| 1 | Pendapatan LO | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Beban | 1.399.737.238,38 | 2.906.700.049,00 |
| 3 | Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2) | (0) | (0) |
| 4 | Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional | (0) | (0) |
| 5 | Pos Luar Biasa | (0) | (0) |
| 6 | Surplus / Defisit LO (3+4+5) | **(1.399.737.238,38)** | 2.906.700.049,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| Dampak KumulatifPerubahanKebijakanAkuntansi/ KesalahanMendasar | **0,00** |  | **0,00** |

Pada bagian Humas dan Protokol Setda kabupaten Lumajang terjadi koreksi berjalan selama tahun 2019*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2018****(Rp)** |  | **31 Desember 2019****(Rp)** |
| Ekuitas Akhir | **615.428.021,12** |  | **(2.291.272.027,88)** |

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2018 dan 2019, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

**Tabel 30 Laporan Perubahan Ekuitas**

*dalamrupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Keterangan**  | **2018** | **2019** |
| 1 | Ekuitas Awal | 615.428.021,12 | 615.428.021,12 |
| 2 | Surplus (defisit) LO | 0,00 | (2.906.700.049,00) |
| 3 | Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar |  |  |
| **4** | **Ekuitas Akhir** | **615.428.021,12** | **(2.291.272.027,88)** |

# IV. INFORMASI NON KEUANGAN

**4.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN LUMAJANG**

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang merupakan embrio dari penggabungan antara Sub Bagian Protokol pada Bagian Rumah Tangga dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DaerahKabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
2. Peraturan BupatiLumajang Nomor 57Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
	1. **STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DaerahKabupaten LumajangberdasarkanPeraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah

**Struktur Organisasi**

**BagianHumas dan Protokol**

**Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang**

**KEPALA BAGIAN**

**HUMAS DAN PROTOKOL**

Kasubag.Pemberitaan

Kasubag.Protokol

Kasubag.Peliputan

**Keterangan :**

1. Kepala Bagian : ARI MURCONO, S.STP., M.Si..;

2. Kasubag. Peliputan : HERRY YOEDIANTO;

3. Kasubag.Protokol : ENDHI SATRYO YUNIANTO, S.Sos.;

4. Kasubag. Pemberitaan : -

**4.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

 Tugas Pokok Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang adalah membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan di bidang peliputan, keprotokolan, dan dokumentasi sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2016 Pasal 20 ayat (1).

1. Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2016 Pasal 20 ayat (2), mempunyai fungsi :
	1. Perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Humas dan Protokol;
	2. Penyelenggaraan pengumpulan dan penyusunan pemberitaan;
	3. Penyelengaraan dan pengaturan layanan penyampaian berita/informasi;
	4. Penyelenggaraan dan pengaturan layananan kegiatan protokoler Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah,dan tamu pejabat pemerintah lainnya;
	5. Pengkoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
	6. Penyediaan petunjuk/pedoman data informasi, protokoler, dan pemberitaan;
	7. Pemfasilitasian kerjasama penyampaian informasi dan keprotokolan;
	8. Pendokumentasian aktifitas dan statement Bupati/Wakil Bupati;
	9. Penyiapan bahan sambutan Bupati/Wakil Bupati dan pejabat lain;
	10. Melakukan pendampingan kegiatan kedinasan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
	11. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
	12. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi;
	13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Administrsi.

Tugas Kepala Sub Bagian Pada Bagian Humas Dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang

* + 1. **Sub Bagian Peliputan mempunyai tugas, sebagai berikut :**
1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Peliputan;
2. Mempersiapkan rencana peliputan acara kegiatan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan media dalam rangka pelaksanaan peliputan;
4. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peliputan dan dokumentasi;
5. Menginventarisir peliputan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bentuk file aneka media;
6. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
	* 1. **Sub Bagian Protokol mempunyai tugas, sebagai berikut :**
	1. Menyusun program kerja Sub Bagian Protokol;
	2. Mengelola data kegiatan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan pejabat pemerintah lain, serta kegiatan Pemerintah Kabupaten;
	3. Mendampingi kegiatan kedinasan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan pejabat pemerintah lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
	4. Memberikan layanan pengaturan kegiatan keprotokoleran;
	5. Menyusun petunjuk/pedoman tata laksana dan tata kerja keprotokolan;
	6. Melaksanakan koordinasi kegiatan keprotokolan;
	7. Menyiapkan peralatan kebutuhan tata kegiatan keprotokolan;
	8. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
	9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
		1. **Sub Bagian Pemberitaan mempunyai tugas, sebagai berikut :**
8. Menyusunan program kerja Sub Bagian Pemberitaan;
9. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan serta mempersiapkan kegiatan untuk media massa;
10. Melakukan jumpa pers;
11. Menyusun berita tentang kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk release berita serta menyajikan berita kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
12. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi untuk penyebaran informasi melalui media agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang memerlukan informasi serta masyarakat;
13. Menyediakan bahan sambutan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
14. Menyusun bahan pemberitaan dan menyajikan berita mengenai kegiatan Bupati/wakil Bupati dan Sekretaris daerah;
15. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

**4.4 Pegawai Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang**

Pegawai Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Lumajang terdiri dari PNS dan Pegawai Tidak Tetap, yang berjumlah 33 orang yang terbagi 22 tenaga kontrak, 10 PNS dan 1 CPNS Tabel 1.

Jumlah Pegawai di Bagian Humas dan Protokol Berdasarkan Golongan Sampai dengan Desember 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **NIP** | **PANGKAT / GOLONGAN RUANG**  | **JABATAN** |
|
| 1 | ARI MURCONO, S.STP.,M.Si. | 19780216 199703 1 001 | Pembina Tingkat I / IV b | KEPALA BAGIAN |
| 2 | HERRY YOEDIANTO | 19631001 198703 1 010 | Penata Tingkat I / III d | KASUBAG. PELIPUTAN |
| 3 | ENDHI SATRYO YUNIANTO, S.Sos. | 19790603 201001 1 018 | Penata / III c | KASUBAG. PROTOKOL |
| 4 | JAMBADI | 19620518 198503 1 010 | Penata Muda Tingkat I / III b | PENGELOLA DATA |
| 5 | HENDRI SETYAWAN, S.I.Kom. | 19900223 201903 1 003 | Penata Muda / III a | PRANATA HUMAS |
| 6 | SUHARNAKA | 19660208 198904 1 001 | Pengatur Tingkat I / II d | PENGEMUDI |
| 7 | MOCHAMAD CHAIYUN | 19810710 200901 1 008 | Pengatur / II c | PETUGAS PROTOKOL |
| 8 | YENI WAHYUNINGTYAS | 19780619 201001 2 014 | Pengatur / II c | PRANATA ACARA |
| 9 | MIRANTHA SARI HARPIDINA | 19840502 201001 2 004 | Pengatur / II c | BENDAHARA / PENGELOLA KEPEGAWAIAN |
| 10 | AGUS SANTOSO | 19710814 200801 1 013 | Pengatur Muda / II a | PRANATA FOTOGRAFI |
| 11 | BAMBANG MARIONO | 19820116 200801 1 012 | Juru / I c | PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH |
| 12 | KURNIAWAN HENDRI YULIANTO | 19800722 | -- | PENGADMINISTRASI UMUM |
| 13 | OVY MANDASARI | 19891023 | -- | PETUGAS PROTOKOL |
| 14 | MUHAMMAD SYAHRUL FADLILLAH | 19910210 | -- | PETUGAS PEMBERITAAN |
| 15 | SANDI PUTRA | 19910714 | -- | PETUGAS PROTOKOL |
| 16 | AGUS VELANI | 19910822 | -- | PETUGAS PROTOKOL |
| 17 | FIRZA NOVE MACHINI | 19921109 | -- | PETUGAS PROTOKOL |
| 18 | DWI ANDIKA DHARMAWAN | 19931117 | -- | PETUGAS PEMBERITAAN |
| 19 | VINY WARDATUR ROSY ROZANA | 19931227 | -- | PETUGAS PROTOKOL |
| 20 | BERTHA VIQIE LORENTYA | 19940924 | -- | PENGADMINISTRASI UMUM |
| 21 | PERMATA ADINDA | 19850422 | -- | PETUGAS PROTOKOL |
| 22 | SILVIA DWI JAYANTINING TYAS | 19890128 | -- | PENGADMINISTRASI UMUM |
| 23 | MUKHAMMAD THEGAR NURCHAKANG | 19940513 | -- | PETUGAS PROTOKOL |
| 24 | SLAMET PRAMONO | 19940714 | -- | PETUGAS PROTOKOL |
| 25 | REZA ALIF AKHMAD | 19941011 | -- | PETUGAS PELIPUTAN |
| 26 | RAHMAT ARIF TRIANTONO | 19941121 | -- | PETUGAS PELIPUTAN |
| 27 | MUCHAMAD YUSUF EFFENDI | 19950523 | -- | PENGADMINISTRASI UMUM |
| 28 | SUBAHRI ARDIANTO | 19960714 | -- | PETUGAS PEMBERITAAN |
| 29 | HERI MISNADI | 19971204 | -- | PETUGAS PROTOKOL |
| 30 | INDRA IBRAHIM | 19980527 | -- | PETUGAS PROTOKOL |
| 31 | ACHMAT WAHYU RAHMANSYAH | 19950125 | -- | PENGEMUDI |
| 32 | CHAIRUL ANWAR | 19820813 | -- | PENGEMUDI |
| 33 | JADI SUTRISNO | 19600201 | -- | PRAMU KEBERSIHAN |

# V. P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang tahun angaran 2019sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang tahun 2019disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar generasi *(Intergenerational Equity).*
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
	1. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
	2. Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfatan surplus anggaran.
	3. Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
	4. Kewajiban(kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
	5. Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
	6. Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
	7. Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
	8. Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
	9. Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 terdiri:
		1. Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
		2. Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
		3. Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
		4. Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan , aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
		5. Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
		6. Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2019.
		7. serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.